

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sangat penting. Pengertian terhadap objek yang diteliti merupakan salah satu unsur dalam pemahaman, untuk ini penelitian menjelaskan variabel yang terdapat dalam penelitian.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Sadono Sukirno (2015, 9) mendefinisikan "*Pertumbuhan Ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah*". Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan terus meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal serta teknologi yang digunakan berkembang.

Simon Kuznets (dalam Arsyad, 2010: 277) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai "*peningkatan kemampuan suatu negara untuk*

menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada kemampuan disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai dari masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam bukunya yang berjudul “*Ekonomi Pembangunan Edisi 5*”, Arsyad mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:

- 1) Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (*human resources*).
- 2) Pertumbuhan ekonomi.
- 3) Kemajuan teknologi.
- 4) Sumber daya institusi (sistem kelembagaan).

2.1.1.2 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Mazhab Merkantilis, yaitu pemikir-pemikir ekonomi di antara akhir abad ke-16 dan akhir abad ke-17,

banyak membahas peranan perdagangan luar negeri terhadap pembangunan ekonomi.

2.1.1.2.1 Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik (dalam Sadono, 2015: 433) ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatian kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan.

Berdasarkan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik juga, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak,

pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi produktivitas penduduk telah menjadi negatif, maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah.

Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (*Stationary State*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

1) Pandangan Adam Smith

Proses pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Arsyad, 2010: 74) dibedakan menjadi dua aspek diantaranya yaitu:

a. Pertumbuhan *output total*

Unsur pokok dalam sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu:

- 1) Sumber daya alam yang tersedia (atau faktor produksi tanah).
- 2) Sumber daya manusia.
- 3) Akumulasi modal yang dimiliki.

Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dan kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum dari pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan *output*. Tetapi pertumbuhan

output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara optimal.

Sumber daya manusia (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan *output*. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Smith memandang tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi dan pembagian kerja (*division of labor*) dan spesialisasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Akumulasi modal yang dimiliki memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan dapat diidentikkan sebagai “dana pembangunan”, cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung pada ketersediaan “dana pembangunan” tersebut. Selain itu, stok modal juga merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat *output*. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan *output*. Jumlah dan tingkat pertumbuhan *output* tergantung pada laju pertumbuhan stok modal yang sesuai dengan “batas maksimum” sumber daya alam.

Pengaruh stok modal terhadap tingkat *output* total bisa secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung ini maksudnya adalah karena penambahan modal (sebagai *input*) akan langsung meningkatkan *output*, sedangkan pengaruh tak langsung maksudnya adalah peningkatan produktivitas per kapita yang dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, semakin

besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas per kapita.

Namun demikian, sebenarnya ada dua faktor penunjang penting dibalik proses akumulasi modal bagi terciptanya pertumbuhan *output* yaitu:

- 1) Makin meluasnya pasar, dan
- 2) Adanya tingkat keuntungan di atas tingkat keuntungan minimal.

Smith (dalam Arsyad, 2010: 76) berpendapat bahwa potensi pasar akan bisa dicapai secara maksimal jika, dan hanya jika, setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dan melakukan kegiatan ekonominya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembenahan dan penuh peraturan-peraturan, undang-undang yang menjadi penghambat kebebasan berdagang dan kegiatan ekonomi, baik antara warga masyarakat di suatu negara maupun antara warga masyarakat antarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa Adam Smith merupakan penganjur *laissez-faire* dan *free trade*.

Faktor penunjang yang kedua yaitu tingkat keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan ini erat hubungannya dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan akhirnya akan mengurangi gairah pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal. Menurut Adam Smith, dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan menurun dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar dan perluasan inilah yang akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah.

Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten, yaitu tingkat upah yang hanya cukup untuk bertahan hidup.

Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sementara itu permintaan akan tenaga kerja akan ditentukan oleh stok modal dan tingkat *output* masyarakat. Oleh karena itu laju pertumbuhan permintaan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan *output*.

2) Pandangan David Ricardo

Pandangan Ricardo mengenai proses pertumbuhan ekonomi tidak jauh berbeda dengan pendapat Adam Smith yang berfokus pada laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga mengungkapkan adanya keterbatasan faktor produksi tanah yang bersifat tetap sehingga akan menghambat proses pertumbuhan *output*. Proses

pertumbuhan menurut David Ricardo dalam buku Lincolin Arsyad (2010) dapat dipahami dengan mengenal asumsi-asumsi yang digunakan yaitu:

- a. Jumlah tanah terbatas.
- b. Tenaga kerja (penduduk) akan meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah nominal. Apabila tingkat upah nominal berada di atas tingkat upah minimal atau tingkat upah alamiah (*natural wage*), maka jumlah tenaga kerja akan meningkat dan sebaliknya.
- c. Akumulasi modal terjadi jika tingkat keuntungan yang diperoleh para pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka untuk melakukan investasi.
- d. Kemampuan teknologi terjadi sepanjang waktu.
- e. Sektor pertanian sangat dominan.

Dengan terbatasnya jumlah tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marjinal (*marginal product*) yang kemudian dikenal dengan istilah hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang (*the law of diminishing returns*). Selama tenaga kerja yang dipekerjakan bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah, jumlah penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah yang mengakibatkan penurunan kembali produk marginal tenaga kerjanya dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat upah.

Proses tersebut akan berhenti jika tingkat upah nominal turun sampai pada tingkat upah alamiah. Jika tingkat upah nominal turun sampai di bawah tingkat upah alamiah, jumlah penduduk (tenaga kerja) akan menurun.

Ini mengakibatkan menurunnya tingkat penawaran atas tenaga kerja yang akan mendorong tingkat upah untuk mengalami kenaikan sampai pada tingkat upah alamiah. Pada posisi ini, jumlah penduduk konstan.

Masih dalam buku Lincoln Arsyad (2010), Ricardo menjelaskan bahwa peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi akan cenderung meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Dengan kata lain, dapat memperlambat terjadinya *the law of diminishing returns* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut Ricardo.

3) Thomas Robert Malthus

Suparmoko (dalam Muammil, 2015: 9) menyebutkan bahwa menurut Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang diperlukan untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa diikuti dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Dengan demikian tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara saja sifatnya, sebab permintaan efektif (*effective demand*) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang.

Maka dari itu, kenaikan jumlah penduduk saja bukan merupakan pendorong kemajuan ekonomi bilamana ia tidak membawa kenaikan permintaan efektif. Lagi pula perkembangan penduduk, walaupun juga menambah permintaan efektif, belum tentu membawa perkembangan ekonomi.

Untuk adanya perkembangan ekonomi, Malthus mengutarakan bahwa diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus. Kapital ini didapat dari apa yang diterima orang sebagai penghasilan yang tidak selalu dibelanjakan semua untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan ada sebagian yang ditabung, sehingga ada kecenderungan bahwa jumlah barang-barang yang dihasilkan tidak semuanya dapat terjual.

Hal tersebut berlainan dengan pendapat yang diutarakan J.B. Say yang terkenal dengan hukum pasarnya: dimana dikatakan bahwa "*supply creates its own demand*", artinya ialah asal jumlah produksi bertambah maka secara otomatis permintaan akan ikut bertambah pula karena pada hakekatnya kebutuhan manusia tidak terbatas. Namun, pendapat ini dikritik oleh Malthus dengan mengatakan bahwa hukum Say itu hanya berlaku bila kenaikan pendapatan seluruhnya digunakan untuk membeli barang-barang/jasa-jasa ($\Delta C = \Delta Y$). Malthus melanjutkan pendapatnya bahwa tabungan sangat perlu demi pembentukan kapital. Kapital harus diinvestasikan dan investasi tersebut baru diadakan setelah ada permintaan untuk investasi. Permintaan akan investasi akan ada bila terdapat kenaikan jumlah

permintaan (*aggregat demand*). Jadi menurut Malthus, adanya perkembangan ekonomi atau kenaikan produksi dapat diharapkan bila ada tabungan yang digunakan untuk keperluan investasi. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif. Adapun kurangnya permintaan efektif disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang berakibat menekan tingkat upah dan di samping itu juga karena pendapatan yang diterima ada yang ditabung dan tidak dikonsumsi semuanya. Oleh karena itu, Malthus merasa pesimis terhadap perkembangan ekonomi.

2.1.1.2.2 Teori Schumpeter

Teori Schumpeter (dalam Sadono, 2015: 434) menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha, merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru.

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan

tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Maka menurut Schumpeter, investasi dapat dibedakan kepada dua golongan: penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi.

Menurut Schumpeter (dalam Sadono, 2015: 435) makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “*stationary state*”. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan Klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi, sedangkan menurut Klasik tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian yang telah berada kembali pada

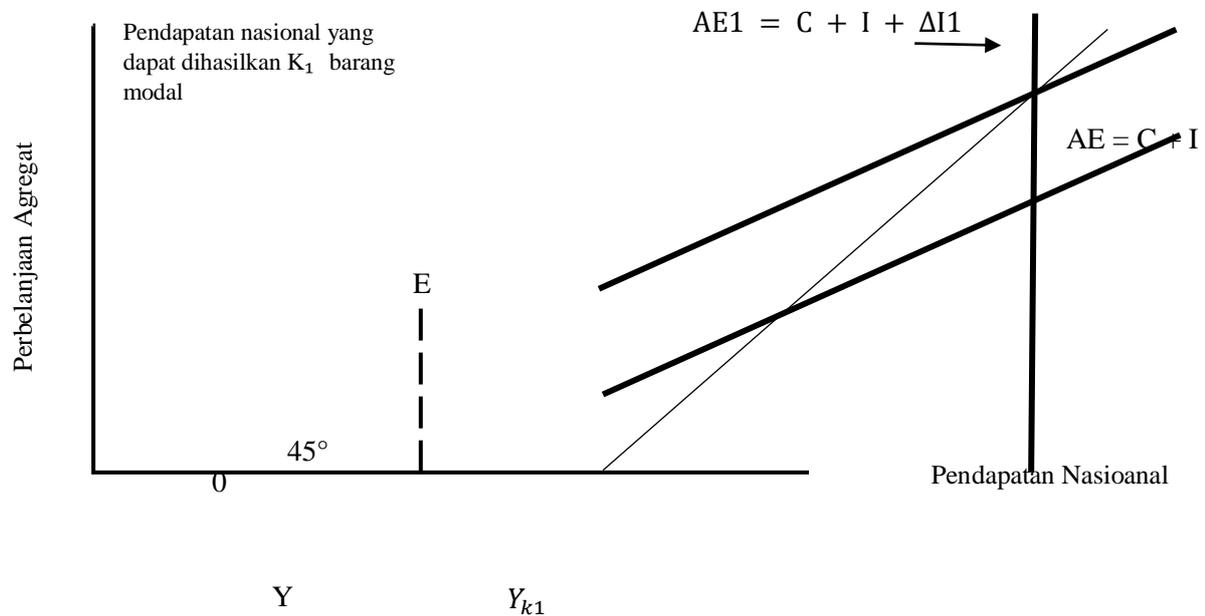
tingkat pendapatan subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.

2.1.1.2.3 Teori Harrod-Domar

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar (dalam Sadono, 2015: 435) bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan berikut: (i) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (iii) rasio modal-produksi (*capital-output ratio*) tetap nilainya dan (iv) perekonomian terdiri dari dua sektor.

Dalam analisisnya Harrod-Domar menunjukkan bahwa, walaupun pada suatu tahun tertentu (misalnya tahun 2002) barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat dalam tahun 2002 yaitu $AE = C + I$, akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya (tahun 2003). Dengan perkataan lain, investasi yang berlaku dalam tahun 2002 akan menambah kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun 2003.

Menyadari tentang penambahan kapasitas barang modal tersebut, analisis Harrod-Domar mengemukakan persoalan tentang bagaimana dan apa syarat yang perlu dipenuhi agar kapasitas barang modal yang bertambah akan digunakan sepenuhnya. Artinya, apakah syaratnya agar pada tahun berikutnya (tahun 2003) barang-barang modal mencapai kapasitas penuh kembali.



Gambar 2.1 Teori Harrod-Domar: Peranan Investasi dalam Pertumbuhan

Sumber: *Makroekonomi Teori Pengantar edisi ketiga, Sadono Sukirno*

Masalah yang dikemukakan oleh Harrod-Domar ditunjukkan dalam gambar 2.1. Pengeluaran agregat yang asal adalah $AE = C + I$. Keseimbangan dicapai di titik E yang menggambarkan: (i) pendapatan nasional adalah Y dan (ii) pada pendapatan nasional tersebut ekonomi mencapai kapasitas penuh. Misalkan jumlah barang modal pada keseimbangan ini adalah K_0 . Seterusnya teori Harrod-Domar menerangkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun 2002 akan menyebabkan jumlah barang modal bertambah pada tahun 2003, yaitu jumlah barang modal menjadi $K_1 = K_0 + I$, di mana K_1 adalah jumlah barang modal pada tahun 2003. Agar semua barang modal sepenuhnya digunakan, pengeluaran agregat pada tahun itu harus mencapai $AE_1 = C + I +$

ΔI . Dengan pengeluaran agregat ini pendapatan nasional adalah Y_{k1} dan nilai ini sama dengan kapasitas barang modal sebanyak K_1 untuk menghasilkan pendapatan nasional. Dengan demikian kapasitas penuh tercapai kembali. Analisis ini menunjukkan, dalam ekonomi dua sektor, investasi harus terus mengalami kenaikan agar perekonomian tersebut mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan. Pertambahan investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat. Dalam contoh yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2002 investasi adalah sebesar I dan pada tahun 2003 investasi perlu meningkat menjadi $(I + \Delta I)$.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan hal yang perlu berlaku apabila pengeluaran agregat meliputi komponen yang lebih banyak, yaitu meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dalam keadaan yang sedemikian, barang-barang modal bertambah dapat sepenuhnya digunakan apabila $AE_1 = C + I_1 + G_1 + (X - M)_1$ sama dengan $(I + \Delta I)$.

Analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis Harrod-Domar merupakan pelengkap kepada analisis Keynesian. Dalam analisis Keynesian yang diperhatikan adalah persoalan ekonomi jangka pendek. Manakala teori Harrod-Domar memperhatikan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui analisis Harrod-Domar dapat dilihat bahwa (i) dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan (ii) pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila $I + G (X - M)$ terus menerus bertambah dengan tingkat yang menggalakkan (Sadono, 2015: 436).

2.1.1.2.4 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Arsyad (2010: 88) menyebutkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut pandangan ekonomi klasik, teori ini mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori ini adalah Robert Solow dan Thevor Swan.

Dalam teorinya, Solow-Swan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (technological progress). Dalam persamaan yang dicantumkan oleh Sadono (2010: 437), pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

di mana,

ΔY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.

ΔK adalah tingkat pertumbuhan modal.

ΔL adalah tingkat pertumbuhan penduduk.

ΔT adalah tingkat perkembangan teknologi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Solow (1956), ia menyatakan bahwa peran dari kemajuan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi sangat dominan. Dari temuannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang mencapai 2,75 persen per tahun pada periode 1909 sampai 1949, lebih dari setengahnya (1,5 persen) merupakan

sumbangan dari kemajuan teknologi, sedangkan sisanya disebabkan oleh penambahan jumlah penggunaan faktor produksi (Arsyad, 2010: 88).

Sadono pun menyatakan dalam bukunya (2015: 437) terdapat beberapa ahli ekonomi lain yang melakukan penyelidikan yang sama sifatnya, salah satu studi yang terkenal adalah yang dilakukan oleh Denison yang menganalisis faktor yang mengakibatkan perkembangan di negara maju di antara tahun 1950-1962 yang mendapat kesimpulan bahwa penambahan barang-barang modal hanya mewujudkan 25 persen dari pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, 18 persen dari pertumbuhan ekonomi di Eropa Barat dan 21 persen dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Inggris. Dengan kata lain, studi Denison menunjukkan bahwa bukan modal, tetapi teknologi dan perkembangan keterampilan yang menjadi faktor utama yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah/daerah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Sebelumnya dalam perhitungan pendapatan daerah dibuat dalam bentuk harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi),

yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu daerah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar daerah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. Ketentuan ini sangat penting diperhatikan dalam ekonomi daerah, karena bisa saja suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan/suntikan dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti apabila suntikan dana itu dihentikan. Dalam kondisi seperti ini, sulit dikatakan ekonomi daerah itu bertumbuh.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Dalam Metadata yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun

dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Dalam Metadata yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1) Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah).

2) Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semua ini sebelum adanya potongan pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

2.1.3 Keuangan Daerah

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah itu sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Santoso (dalam Dwi dan Fahmi, 2012: 15) menyatakan bahwa dalam masalah keuangan daerah, perimbangan pembiayaan pemerintah pusat dan daerah dengan pendapatan yang secara leluasa digali sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri masih mempunyai kelemahan sehingga keterbatasan dalam potensi penerimaan daerah tersebut bisa menjadikan ketergantungan terhadap transfer pusat. Pemerintah Daerah selama ini memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensi sendiri (PAD). Selama ini komponen pembiayaan terbesar berasal dari dana transfer pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan hanya sebagian kecil dari PAD, potensi pembiayaan lain yang belum dikelola yaitu dari pinjaman daerah.

2.1.3.1 Penerimaan Daerah

Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah dapat meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Suparmoko, 2002: 41).

2.1.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah.

Halim (dalam Rarung, 2016: 451) mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 disebutkan mengenai sumber pendapatan asli daerah yaitu dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Suparmoko, 2002: 56).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menjadi pajak daerah provinsi meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Adapun yang termasuk pajak daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
- g. Pajak Parkir.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suparmoko, 2002: 85). Sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi ini dianut asas manfaat (*benefit principles*), yang dimana dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Terdapat banyak jenis retribusi, tetapi Suparmoko (2002, 87) mengelompokkan retribusi ini menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Jasa-jasa pelayanan tersebut di antaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum
- b. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
- c. Retribusi yang dikenakan pada perijinan tertentu

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan Peraturan Pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan, kemudian untuk beberapa jenis perijinan tertentu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah karena walaupun perijinan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait (Suparmoko, 2002: 87).

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan penerimaan lain-lain PAD yang sah (LLPADS).

Objek hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;

- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; dan
- d. Hasil kerja sama dengan pihak ketiga. (Undang-undang Nomor 10 tahun 2017).

4) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADS) adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Objek LLPADS terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. Pendapatan dari bahan layanan umum daerah;
- o. Dana kapitasi jaminan kesehatan nasional; dan
- p. Hasil pengelolaan dana bergulir.

Subjek LLPADS adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan tersebut. (Undang-undang Nomor 10 tahun 2017).

2.1.3.1.2 Dana Perimbangan

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 mengartikan Dana Perimbangan sebagai suatu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Di dalamnya pun membagi Dana Perimbangan menjadi tiga bagian, antara lain (a) Dana Bagi Hasil; (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus.

Selain itu dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah serta untuk mengurangi keseimbangan pendanaan pemerintahan antar daerah, diperlukan adanya dana perimbangan adalah untuk lebih meratakan daerah antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal dari daerah lainnya dalam mencapai tujuan perekonomian bangsa. Dana Perimbangan meliputi:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah suatu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil dari pajak meliputi (a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (c) Pajak Penghasilan (PPH), sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam meliputi (a) Kehutanan; (b) Pertambangan umum; (c) Perikanan; (d) Pertambangan minyak bumi; (e) Pertambangan gas bumi; dan (f) Pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah suatu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Jumlah keseluruhan DAU yang ditetapkan dalam APBN sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Penentuan proporsi ini belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan

kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).

Mekanisme perhitungan DAU di dalam pertimbangan otonomi daerah dilakukan pertama kali oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah (DPOD). Selanjutnya DPOD memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU tersebut kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya, kemudian Menteri Keuangan melakukan perumusan formula dan perhitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD, lalu Menteri Keuangan menyampaikan formula dan perhitungan DAU tersebut sebagai bahan penyusunan RAPBN (Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005).

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mandanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005).

Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang sulit diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan/atau kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

2.1.3.1.3 Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah bertujuan untuk memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Pinjaman daerah bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga keuangan bank;
- d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. Masyarakat.

Pinjaman yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri Keuangan, sedangkan pinjaman dari masyarakat berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004).

2.1.3.2 Pengeluaran Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan

bahwa Pengeluaran daerah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran daerah terdiri dari belanja aparatur, belanja publik serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

2.1.4 Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai *“pengeluaran atau pengeluaran penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian”* (Sadono Sukirno, 2015: 121). Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasi.

Investasi pada hakekatnya merupakan suatu awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang diharapkan dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa tujuan dalam penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

- b. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi, baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA, tentunya diperlukan dalam mencapai suatu target pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam sebuah proses pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dahulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu:

- a. Undang-undang ini dengan “Modal Dalam Negeri” adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
- b. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan

berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan “Penanaman Modal Dalam Negeri” adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Banten 2010-2014 (Ahmad Jazuli Rahman, Aris Soelistyo, Syamsul Hadi, 2016)	Menggunakan variabel terikat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel bebas Investasi.	Menggunakan variabel bebas Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja	Investasi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan, Tenaga Kerja berpengaruh negatif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Banten.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.14, No.02 Desember 2016, hlm. 112-121

2	Analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Abdul Mafahir, Aris Soelistyo, M. Faisyal Abdullah, 2017)	Menggunakan variabel terikat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel bebas PAD	Menggunakan variabel bebas DAU dan DAK	PAD berpengaruh tidak signifikan dan bersifat negatif, DAU berpengaruh positif dan signifikan, DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 1/201, hlm. 143 – 152
---	--	---	--	---	---

No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pengaruh PAD, Belanja Modal dan Angkatan Kerja terhadap PDRB per kabupaten/kota di Provinsi Bali (Ni Putu Sri Eka Lestari, Made Kembar Sri Budhi, 2014)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas PAD	Menggunakan variabel bebas Belanja Modal dan Angkasan kerja per kabupaten/kota di Provinsi Bali	PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pembangunan. Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran PDRB. PAD memiliki pengaruh terhadap PDRB melalui Pengeluaran Pembangunan. Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap PDRB kabupaten/kota di Bali melalui Pengeluaran Pembangunan.	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 12, Desember 2014, hlm. 558-556. ISSN: 2303-0178
4	Pengaruh PAD dan DAU terhadap PDRB di Kota Manado (Patric Rarung, 2016)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas PAD	Menggunakan variabel bebas Dana Alokasi Umum (DAU)	Pengaruh PAD terhadap PDRB berpengaruh signifikan, DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Pemerintah Kota Manado.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 03 Tahun 2016, hlm. 449-460

5	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Yody Prawira Sunardi, Vekie A. Rumate, Hanly F. Dj Siwu, 2017)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas PAD dan Dana Perimbangan	Menggunakan variabel bebas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	PAD, Dana Perimbangan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 No. 01 Tahun 2017, hlm. 79-86
---	---	---	---	--	---

Lanjutan tabel 2.1

No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Analisis Pengaruh Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau periode 2004-2015 (Maret Edianto, 2017)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Menggunakan variabel bebas Penanaman Modal dan Pengeluaran Pemerintah	Hasil uji parsial PMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan, PMDN berpengaruh positif namun tidak signifikan, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kota Dumai. Secara Simultan, PMA, PMDN dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Dumai.	JOM Fekon Vol.4 No.1 April, 2017, hlm. 1785-1799

7	Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Papua (Mursalam Salim, SE., M.Si, 2013)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas PMDN	Menggunakan variabel bebas PMA dan Tenaga Kerja	Secara simultan maupun parsial, Jumlah Tenaga Kerja, PMA dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi Papua.	Jurnal Manajemen dan Akuntansi Vol 1, No 1 Tahun 2013, hlm. 94-103
8	Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara (Dewi Maharani, 2016)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas PMDN	Menggunakan variabel bebas PMA dan Tenaga Kerja	Investasi Domestik, Investasi Asing dan Tenaga Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Sumatera Utara secara parsial maupun simultan.	Intiqad Vol. 8 No. 2 Desember 2016: 32 – 46

Lanjutan tabel 2.1

No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

9	Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh (Zulfa Eliza, Said Muhammad, Muhammad Nasir, 2014)	Menggunkan variabel terikat PDRB dan variabel bebas Dana Perimbangan	Tidak menggunakan variabel bebas PAD dan PMDN, serta bagian dari Dana Perimbangan dihitung terpisah	Secara umum, DAU dan DBH berpengaruh positif terhadap PDRB Riil., DAK tidak berpengaruh terhadap PDRB Riil (hasil estimasi tidak signifikan). DAU, DAK dan DBH di masing-masing wilayah ada yang berpengaruh positif maupun tidak berpengaruh antar wilayah.	Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2, No. 1, Februari 2014 ISSN 2302-0172 hlm. 44-54
10	Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat (Hasdi Aimon Dan Rova Luarta Putra, 2016)	Menggunkan variabel bebas PAD dan Dana Perimbangan	Tidak menggunakan variabel bebas PMDN	PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Jurnal Kajian Ekonomi Vol 4, No 7 (2015)
11	Desentralisasi Fiskal dan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Yogyakarta (Dwi Suciayu, Fahmi Wibawa, 2012)	Menggunkan variabel terikat PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) dan variabel bebas PAD	Menggunakan variabel bebas DAU, DAK, DBH yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan (diteliti secara terpisah)	PAD, DAU, DAN DBH berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta	Signifikan Vol. 1 No. 1 April 2012, hlm. 13-26

Lanjutan tabel 2.1

No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

12	Pengaruh PMA, PMDN, Angkatan Kerja, Inflasi dan Ekspor Neto terhadap PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa (Kurnia Martikasari, 2016)	Mengg unakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas PMDN	Meng gunak an variab el bebas PMA, Inflasi dan Ekspo r Neto	PMA maupun PMDN tidak mempunyai pengaruh terhadap PDRB di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Angkatan kerja dan Ekspor Neto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, Laju Inflasi tidak berpengaruh terhadap PDRB di provinsi-provinsi di Pulau Jawa.	Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 02, No.02, Oktober 2016. ISSN 2301- 511X
13	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 1992-2011 (Trias Fajar Novianto, Hastarini Dwi Atmanti, 2013)	Mengg unakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas PAD dan PMDN	Meng gunak an variab el bebas PMA dan Angk atan Kerja	PAD, PMA dan Angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan variabel PMDN tidak signifikan terhadap PDRB. Semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1992-2011.	<i>Diponegoro Journal of Economics</i> Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 1-9. ISSN : 2337-3814
14	Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Domestik serta Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015 (Khairunnisa , Aris Soelistyo , Hendra Kusuma, 2017)	Mengg unakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas PMDN	Meng gunak an variab el bebas PMA dan Penge luaran Pemer intah	PMA dan PMDN serta pengeluaran pemerintah secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB	Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 4/Tahun 2017, hlm. 482-498

Lanjutan tabel 2.1

Lanjutan tabel 2.1

No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Pengaruh Investasi PMDN, PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat (Yetty Agustini, 2017)	Menggunakan variabel terikat PDRB dan variabel bebas PMDN	Menggunakan variabel terikat (lainnya) Jumlah Penduduk Miskin dan variabel bebas PMDN dan Tenaga Kerja	Investasi, PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.	Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2017, Vol. 6, No. 2, hlm. 97-119

2.3 Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dengan peningkatan nilai PDRB, dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal itu, setiap provinsi di Pulau Jawa menggali dana dari investasi yang ada dan menggali potensi daerahnya.

2.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB)

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih

tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sidik, dalam Novianto: 2013).

Peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun.

2.3.2 Hubungan Dana Perimbangan dengan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB)

Menurut Bahl (dalam Faizal, 2018), desentralisasi fiskal merupakan transfer tanggung jawab dan kewenangan anggaran untuk penerimaan dan belanja dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta memberikan mereka kekuatan untuk membuat keputusan.

Desentralisasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mendorong setiap institusi untuk dapat bersaing secara global. Desentralisasi merupakan kebijakan yang memiliki kebalikan dari sentralisasi, di mana sentralisasi adalah sistem pengelolaan dan kebijakan secara terpusat sedangkan desentralisasi adalah merupakan pembagian dan pelimpahan wewenang.

Sumber-sumber daerah dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal selain dari Pendapatan Asli Daerah, juga ada dari penerimaan bagi daerah dalam bentuk

Dana Perimbangan yang terdiri dari tiga komponen yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dapat disimpulkan selain dari sisi pengeluaran dampak dari kebijakan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan terhadap pertumbuhan ekonomi juga penting untuk dilihat. Untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah daerah agar tidak terjadi kesenjangan transfer pusat terhadap daerah dalam bentuk DBH, DAU dan DAK diharapkan agar dapat menambah modal bagi daerah dalam melaksanakan rencana-rencana pembangunan. Dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dengan upaya menambah modal bagi daerah hal ini berarti sesuai dengan teori pertumbuhan Neo-Klasik dimana dalam teori tersebut akumulasi modal merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dari besaran nilai PDRB.

2.3.3 Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

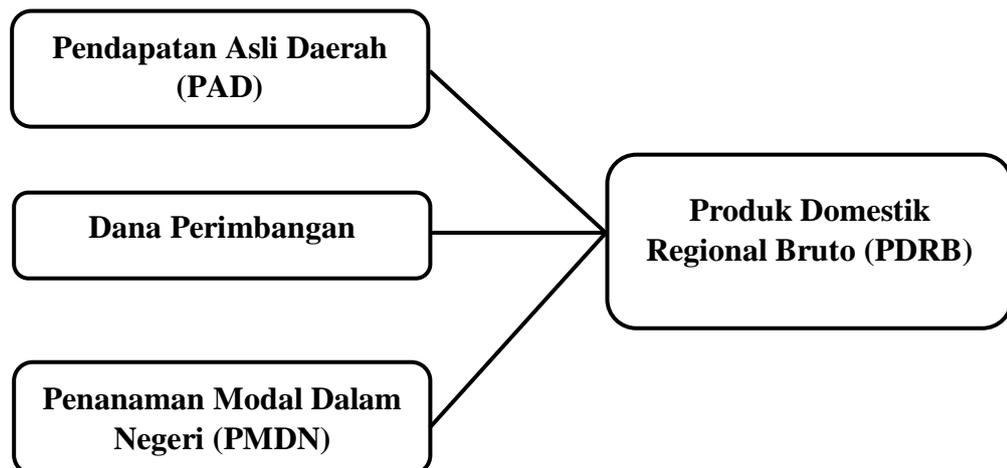
Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti pentingnya pembentukan penanaman modal dalam negeri sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Arti pentingnya pembentukan penanaman modal dalam daerah disini adalah bahwa masyarakat tidak menggunakan semua pendapatannya untuk dikonsumsi, melainkan ada sebagian yang ditabung dan tabungan ini diperlukan untuk pembentukan investasi. Selanjutnya pembentukan penanaman modal dalam daerah ini telah dipandang sebagai salah satu factor di dalam pembangunan ekonomi. Misalkan, investasi dalam peralatan modal atau

pembentukan modal. Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara pembentukan penanaman modal dalam negeri dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

Dalam upaya pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting, karena akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan ekonomi suatu daerah, di mana penanaman modal dalam negeri itu dapat dilakukan dengan cara menghimpun akumulasi modal untuk membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka *output* potensial suatu bangsa akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah *output* dan pendapatan. Dengan semakin besarnya Penanaman Modal Dalam Negeri baik tingkat investasi maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah (Simanjuntak, 1985: 21).

Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat. Dengan demikian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan semakin besarnya Penanaman Modal Dalam Negeri pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah tersebut. Dengan demikian tingkat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dijadikan indikator dalam peningkatan produk domestik.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Untuk dapat mengarahkan hasil penelitian, disampaikan suatu hipotesis penelitian. Hipotesis ini akan diuji kebenarannya dan hasil ujian ini akan dapat dipakai sebagai masukan dalam menentukan kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang dikemukakan dan masih lemah kebenarannya. Hipotesis juga dipandang sebagai konklusi yang sifatnya sementara.

Dari uraian permasalahan yang ada, maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa.
- 2) Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Pulau Jawa.